

LAPORAN KINERJA



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2022 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Paringin, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Balangan



H. ABLI, S.Pd, M.AP
NIP. 19690813 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum SKPD	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Renstra SKPD	6
B. Rencana Kerja (Renja) SKPD.....	8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	15
D. Perjanjian Kinerja SKPD	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	29
C. Kinerja Lainnya.....	40
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial, serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan terdapat 3 (tiga) sasaran dan indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022. Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan telah dicapai, yaitu dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas SKPD. Untuk tahun 2022, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan `menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksana, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi,

tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

1. Undang- Undang
 - UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah
 - PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
3. Peraturan Presiden
 - Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Menteri PAN dan RB
 - PermenPANRB No.53 /2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati
 - Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

D. Gambaran Umum SKPD

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. Pengembangan iklim penanaman modal;
 2. Promosi penanaman modal;
 3. Pelayanan penanaman modal;
 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 5. Data dan sistem informasi penanaman modal;
 6. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan;
 7. Pengembangan kawasan transmigrasi;
 8. Pelatihan kerja;
 9. Produktifitas tenaga kerja;
 10. Penempatan tenaga kerja; dan
 11. Hubungan industrial;

- b. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

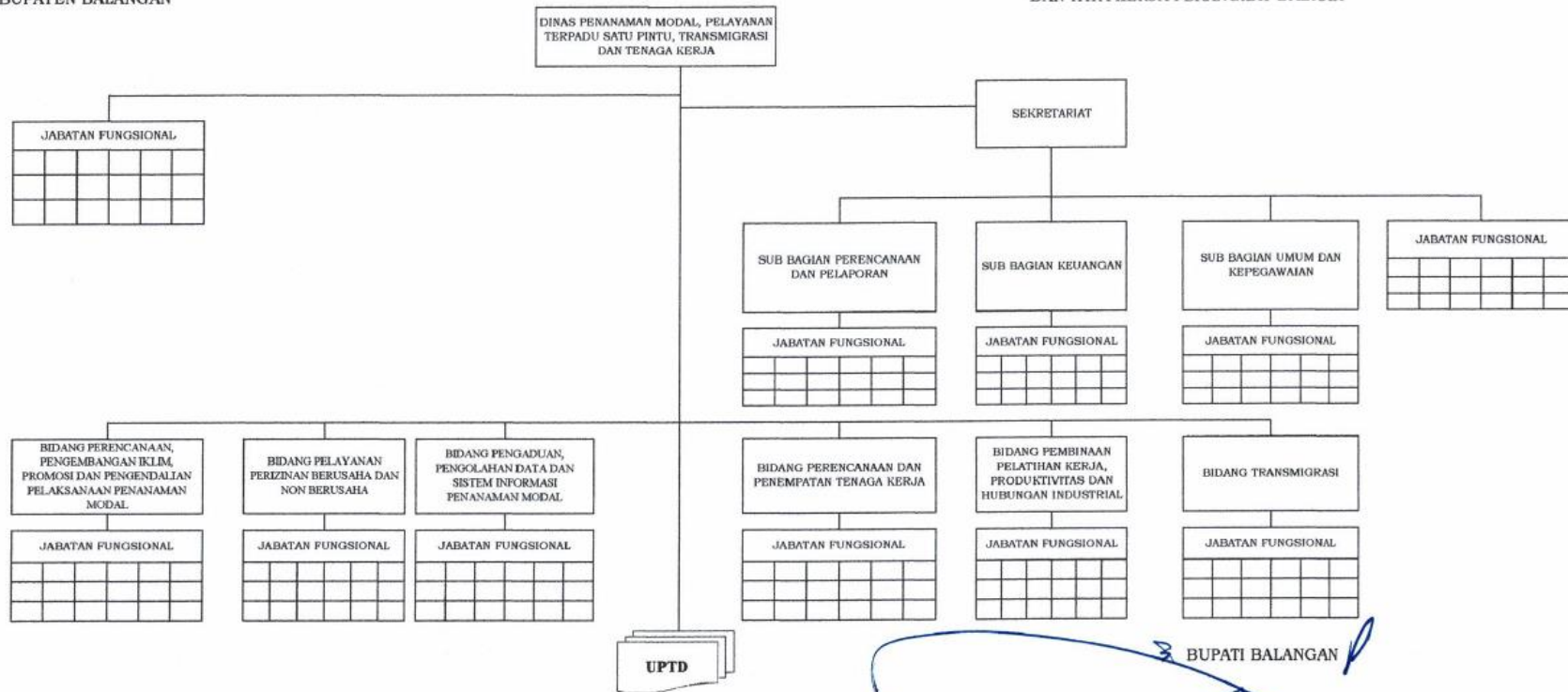
Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. **Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
4. **Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**
5. **Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
6. **Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja**
7. **Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial**
8. **Bidang Transmigrasi**
9. **Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
10. **Jabatan Fungsional**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGIAN HUKUM
KABAG HUKUM KASURBAG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD

Perumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu :

**“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG
LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”.**

Makna dari Visi tersebut adalah :

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai dengan misi kedua yaitu :

“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata serta ekonomi kreatif”

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Dan Misi keempat yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Tabel T-C.25.									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi investasi	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	290,09 M
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka pengangguran terbuka	2,46	2,43	2,40	2,37	2,34	2,30
3	Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTPTTK	87	87,50	88	88,50	89	89,50

B. RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 12 program dengan 22 kegiatan yang terdiri dari 59 Sub Kegiatan. Adapun rencana program kegiatan tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

**A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja

A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

9. Program Penempatan Tenaga Kerja

A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 3) Perluasan Kesempatan Kerja

10. Program Hubungan Industrial

A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyuluhan Transmigrasi

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap

Kemandirian

Sub Kegiatan

- 1) Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
- 2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan			Penanggung Jawab	Sumber Data
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator		
1	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi investasi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun	Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya	DPMPTSPTTK	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	DPMPTSPTTK	Database Ketenagakerjaan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK	Dengan penyelesaian aduan/ keluhan masyarakat tentang pelayanan perizinan maka diharapkan terjadi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat yang diinginkan.	Dengan adanya indikator tersebut untuk mengetahui sejauhmana layanan yang diberikan dan tetap terlaksanannya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.	<p>a. Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan, display touch screen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SMS Gateway;</p> <p>b. Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;</p> <p>c. Tingkat pengaduan yang rendah relatif mencerminkan bahwa pemohon izin sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan.</p>	DPMPTSPTTK	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

D. PERJANJIAN KINERJA SKPD

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi investasi	238,65 M
2	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka pengangguran terbuka	2.43
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTPTK	87.50 (A)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,332,868,447.00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 62,370,000.00	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 265,640,000.00	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 95,830,000.00	APBD
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 133,400,000.00	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 145,910,000.00	APBD
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 121,422,000.00	APBD
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2,743,645,100.00	APBD
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 222,122,500.00	APBD
10	Program Hubungan Industrial	Rp 366,680,000.00	APBD
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 226,457,000.00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	238,65 Milyar	403,601 Milyar	169,19 %
Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka Pengangguran Terbuka (TPT)	2,43	3,98	36,21%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK	87,5 (A)	88,50 (A)	101,14%

Sasaran 1
Meningkatnya Investasi Daerah

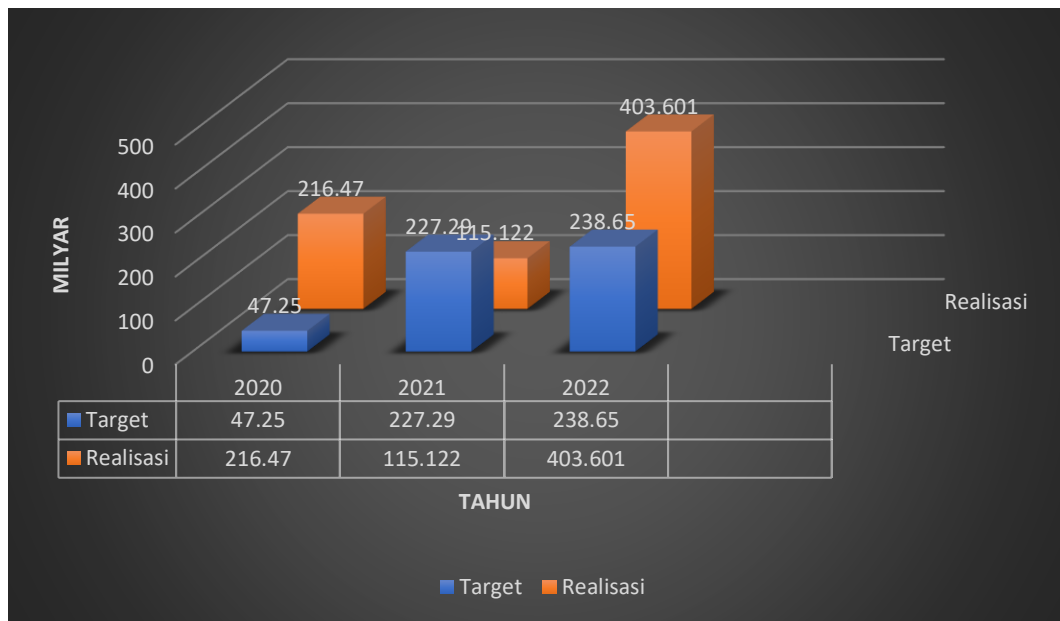
Tabel Sasaran dan Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	238,65 Milyar	403,601 Milyar	169,19 %	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Realisasi Investasi tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

- a. Realisasi Investasi pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 403,601 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 115,122 Milyar, hal ini berarti ada peningkatan pada pencapaian di tahun 2022 yakni sebesar 288,479 Milyar.

- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sangat tinggi.



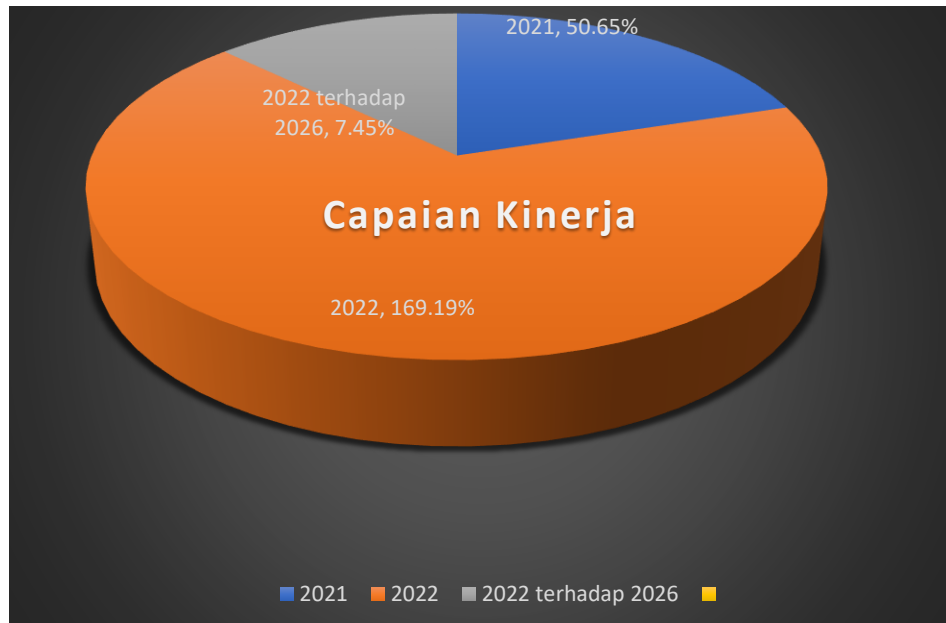
Grafik Realisasi Investasi

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Realisasi Investasi	50,65%	238,65 M	403,601 M	169,19 %	32,03 %
Rata-rata Capaian				169,19 %	32,03 %

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi tahun 2022 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 32,03 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2022 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp 403.601.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta

Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi investasinya sebesar Rp 115,122,788,614,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi mengalami peningkatan sebesar 288,479 Milyar



Grafik Capaian Kinerja Realisasi Investasi

1. Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lain-lain, sehingga berpengaruh terhadap penambahan investasi.
2. Banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.

4. PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM mengklasifikasi kriteria UMKM;
 - a) Permodalan usaha mikro paling banyak 1 milyar rupiah dan hasil penjualan paling banyak 2 milyar,
 - b) Permodalan usaha kecil antara 1 sampai 5 milyar rupiah dan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar, dan
 - c) Permodalan usaha menengah antara 5 sampai 10 milyar rupiah hasil penjualan 15 sampai 50 milyar. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh usaha berkategori mikro, sehingga banyak usaha mikro di kabupaten Balangan yang tidak menyumbang besaran realisasi penanaman modal.
5. Beberapa pelaku usaha belum migrasi ke OSS RBA dan lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM.
6. Pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain;
 - a) Tidak adanya alamat kantor yang jelas,
 - b) Kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.

Upaya yang telah dilaksanakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan;

1. Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM bagi pelaku usaha.
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan berusaha dan kiat-kiat berinvestasi bagi para pelaku usaha.
3. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.
4. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memohon perizinan berusaha.

5. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha dan DPMPTSPPTTK melalui kanal media sosial sehingga informasi terkait investasi/penanaman modal dapat dikomunikasikan dengan cepat.
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, khususnya bagi pelaku usaha yang dapat ditemui.
7. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.

Sasaran 2

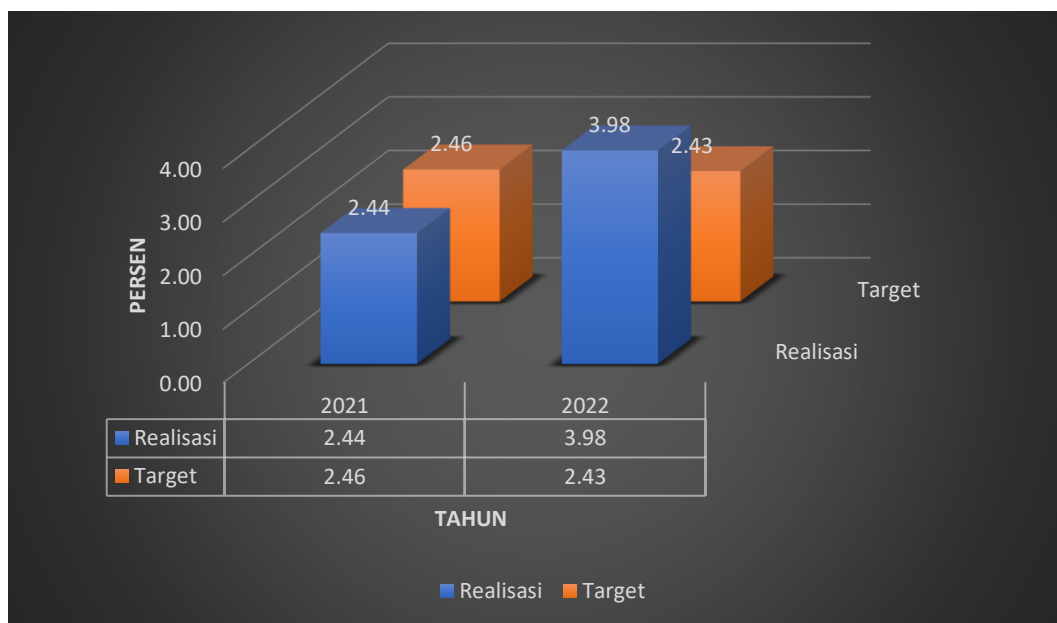
Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)

Tabel Sasaran dan Indikator 2

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka Pengangguran Terbuka	2,43	3,98	36,21%	Sedang

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Angka Pengangguran Terbuka tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- a. Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 3,98. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 2,44, hal ini berarti mengalami penurunan. Tetapi jika dibanding dengan 13 Kabupaten Kota se Kalsel Balangan berada di Peringkat 5 serta dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,74 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 5,86 maka Pengangguran di Kabupaten Balangan masih lebih rendah.
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sedang



Grafik Angka Pengangguran Terbuka

Tabel Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Indikator	2021	2022			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Angka Pengangguran Terbuka	100,82%	2,43	3,98	36,21%	Sedang	57,79%

Terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2022 sebesar 2,43% dan realisasi yang dicapai 3,98%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran Terbuka sebesar 61,06% dengan kategori capaian **Sedang**.

Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah pengangguran sebesar 2.830 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 71.143 jiwa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan capaian:

1. Pada Tahun 2022 Dunia Kerja masih dalam proses pemulihan dan proses bangkit pasca pandemic Covid 19.
2. Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 dilakukan oleh BPS pada bulan Agustus pada saat kondisi sedang mencoba untuk pulih dan bangkit paska Pandemi Covid 19.
3. Bulan Agustus ketika dilakukan Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 bersamaan dengan kelulusan bagi Siswa SMA sehingga mempengaruhi Jumlah Angkatan Kerja yang tidak bekerja.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian target ini adalah Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Balangan yang bertambah pasca kelulusan Siswa SMA dan kuliah sehingga menambah potensi peningkatan pada jumlah pengangguran terbuka.

Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lain-lain.

Disamping itu juga sulitnya mendeteksi angka penempatan tenaga kerja, karena penerima kerja ataupun pekerja yang sudah dapat pekerjaan tidak lapor ke DPMPTSPPTTK Kabupaten Balangan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang akan dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan jumlah paket pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
2. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi pencari kerja
3. Mengadakan pelatihan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan di pedesaan serta meningkatkan peran UMKM.
4. Meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pelatih guna meningkatkan kemampuan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Swasta dalam meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dan untuk menangani angka penempatan kerja yaitu dengan melakukan jemput bola/menyurati kepihak penerima pekerjaan untuk meminta/melaporkan data pencari kerja yang telah diterima bekerja.

Sasaran 3

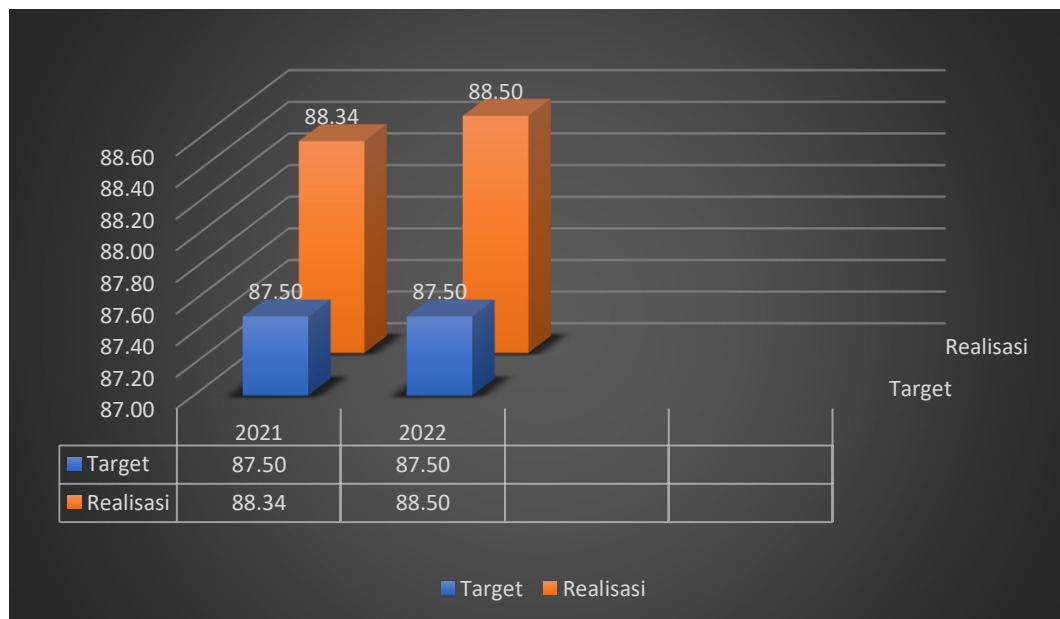
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Tabel Sasaran dan Indikator 1

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	88,50	101,14%	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSPPTK Kabupaten Balangan adalah 88,50 setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan sangat baik.
- c. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dikatakan sangat tinggi.

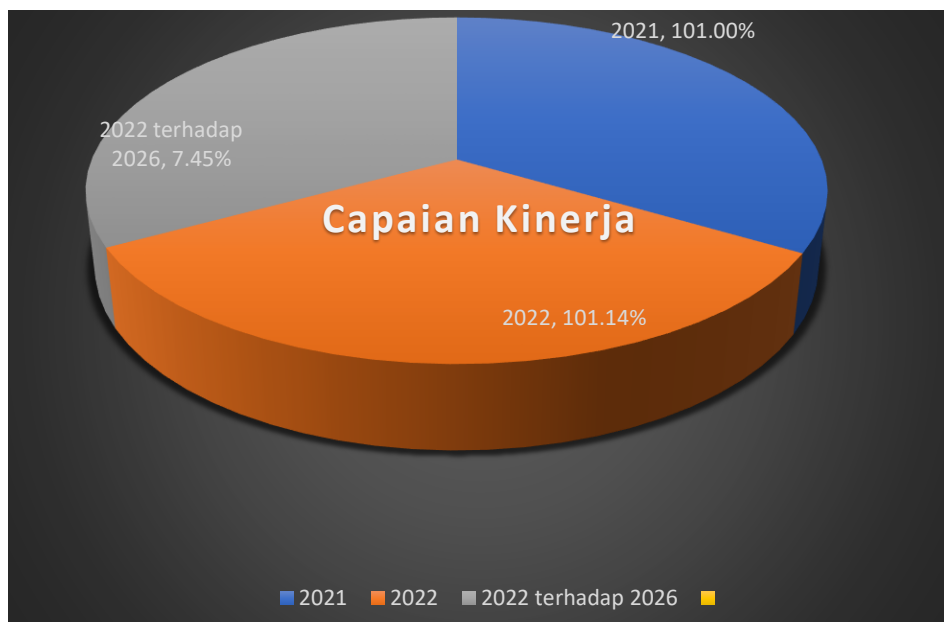


Grafik Realisasi IKM

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,34	87,50	88,50	101,14 %	99,44 %
Rata-rata Capaian				101,14 %	99,44 %

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 99,44 %.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 adalah 88,50 dengan Predikat Sangat Baik. Jika disbanding dengan capaian sebelumnya sebesar 88,34 maka capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,18%.



Grafik Capaian Kinerja Realisasi IKM

1. Secara keseluruhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
2. Ruangan pelayanan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayanan telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca dan flakat informasi mengenai pelayanan air minum gratis serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

Upaya yang telah dilaksanakan DPMPTSPPTTK dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya:

1. Menjadikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.
2. Selalu memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur pelayanan sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan yang telah diraih.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap unsur unsur pelayanan yang memiliki Nilai kurang seperti syarat dan prosedur pelayanan sehingga mempermudah para pelaku usaha.

B. REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	30%	30%	100,00	120.702.000	117.699.208	97,51	3.002.792
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70%	70%	100,00	120.702.000	117.699.208	97,51	3.002.792
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	120.702.000	117.699.208	97,51	3.002.792
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4%	6,83%	170,75	2650573100	2.453.616.799	92,57	196.956.301
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	100,00	2.473.903.100	2.286.296.999	92,42	187.606.101
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Paket Pelatihan	2 Paket Pelatihan	100,00	765.310.200	731.672.999	95,60	33.637.201
		32 Orang	32 Orang	100,00				-

3	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	3 Paket Pelatihan	3 Paket Pelatihan	100,00	368.072.000	277.399.000	75,37	90.673.000
4	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	1.340.520.900	1.277.225.000	95,28	63.295.900
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	100%	100,00	92.970.000	90.844.200	97,71	2.125.800
5	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 LPK	2 LPK	100,00	92.970.000	90.844.200	97,71	2.125.800
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	100%	100,00	83.700.000	76.475.600	91,37	7.224.400
6	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100 Orang	25 Orang	25,00	83.700.000	76.475.600	91,37	7.224.400
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	65%	65,71 %	101,09	222.842.500	218.652.404	98,12	4.190.096
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	750 Orang	884 Orang	117,87	222.842.500	218.652.404	98,12	4.190.096
7	Pelayanan antar Kerja	750 Orang	884 Orang	117,87	127.992.700	127.229.806	99,40	762.894
8	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5 Orang	5 Orang	100,00	36.714.800	33.690.800	91,76	3.024.000
9	Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	20 Orang	100,00	58.135.000	57.731.798	99,31	403.202
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%	100%	100,00	366.680.000	350.253.585	95,52	16.426.415

		100%	100%	100,00				-
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	110.620.000	107.885.679	97,53	2.734.321
10	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100 Dokumen	100 Dokumen	100,00	110.620.000	107.885.679	97,53	2.734.321
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	256.060.000	242.367.906	94,65	13.692.094
11	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 kali	100 kali	100,00	216.850.000	205.417.506	94,73	11.432.494

12	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100,00	39.210.000	36.950.400	94,24	2.259.600
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63 (BB)	75,19 (BB)	119,34	10.284.210.847	8.859.841.297	86,15	1.424.369.550
		100%	90%	90,00				-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	115.160.000	102.201.922	88,75	12.958.078
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	19.348.000	18.893.272	97,65	454.728
14	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100,00	12.974.000	12.830.000	98,89	144.000
15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	100,00	6.184.000	6.130.000	99,13	54.000
16	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	100%	100,00	8.504.000	7.784.800	91,54	719.200
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100,00	6.184.000	6.110.000	98,80	74.000
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100,00	48.882.000	38.143.000	78,03	10.739.000

19	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	13.084.000	12.310.850	94,09	773.150
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	7.880.463.047	6.540.074.413	82,99	1.340.388.634
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100,00	7.264.254.247	6.008.206.749	82,71	1.256.047.498
21	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100,00	579.920.000	495.651.264	85,47	84.268.736
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	100%	100,00	6.234.000	6.224.000	99,84	10.000
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100,00	8.156.800	8.104.400	99,36	52.400
24	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	100%	100,00	8.432.000	8.432.000	100,00	-
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100%	100%	100,00	6.234.000	6.234.000	100,00	-
26	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100,00	7.232.000	7.222.000	99,86	10.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	423.500.000	414.687.253	97,92	8.812.747
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stell	50 Stell	100,00	47.500.000	45.250.000	95,26	2.250.000
		50 Stell	50 Stell	100,00				-

28	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100,00	376.000.000	369.437.253	98,25	6.562.747
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00	553.000.300	552.480.436	99,91	519.864
29	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84 Buah	100 Buah	119,05	20.205.400	20.205.400	100,00	-
30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Buah	100 Buah	333,33	40.000.000	40.000.000	100,00	-
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40262 Lembar	12700 Lembar	31,54	71.181.900	71.138.100	99,94	43.800
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Bahan bacaan	3 Bahan bacaan	100,00	4.000.000	4.000.000	100,00	-
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182 Orang/hari	182 Orang/hari	100,00	417.613.000	417.136.936	99,89	476.064
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00	825.997.500	764.898.997	92,60	61.098.503
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100,00	397.310.000	355.561.497	89,49	41.748.503
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100,00	428.687.500	409.337.500	95,49	19.350.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00	486.090.000	485.498.276	99,88	591.724

36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100,00	377.850.000	377.258.276	99,84	591.724
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100,00	108.240.000	108.240.000	100,00	-
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0%	0%	0,00	0	0	0,00	-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2 Kerjasama	2 Kerjasama	100,00	62.370.000	49.305.880	79,05	13.064.120
		1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	100,00				-
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Draft Perbup	1 Draft Perbup	100,00	36.300.000	29.288.680	80,69	7.011.320
39	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Perda/Perbup	2 Perda/Perbup	40,00	36.300.000	29.288.680	80,69	7.011.320
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen Peta Potensi	100,00	26.070.000	20.017.200	76,78	6.052.800

40	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen Review RUPM	1 Dokumen Review RUPM	16,67	11.850.000	7.420.000	62,62	4.430.000
41	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6 Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen Peta Potensi	16,67	14.220.000	12.597.200	88,59	1.622.800
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.238.650.000 .000	Rp.403.601.00 0.000	221,71	265.640.000	262.450.510	98,80	3.189.490
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	265.640.000	262.450.510	98,80	3.189.490
42	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Investor	1 Investor	50,00	12.980.000	12.362.300	95,24	617.700
		5 Item	3 Item	60,00				-
43	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75,00	252.660.000	250.088.210	98,98	2.571.790
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	100,00	133.400.000	130.326.000	97,70	3.074.000
		100%	100%	100,00				-
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100,00	133.400.000	130.326.000	97,70	3.074.000

44	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	100%	100,00	14.000.000	14.000.000	100,00	-
45	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	100,00	22.490.000	22.490.000	100,00	-
46	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100,00	52.050.000	49.090.000	94,31	2.960.000
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100%	100%	100,00	44.860.000	44.746.000	99,75	114.000
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	100,00	498.703.000	319.573.200	64,08	179.129.800
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	498.703.000	319.573.200	64,08	179.129.800
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 laporan	100 laporan	100,00	16.040.000	13.665.200	85,19	2.374.800
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Perusahaan	30 Perusahaan	120,00	399.590.000	237.005.100	59,31	162.584.900

50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Perusahaan	30 Perusahaan	120,00	83.073.000	68.902.900	82,94	14.170.100
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100,00	145.910.000	142.522.203	97,68	3.387.797
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00	145.910.000	142.522.203	97,68	3.387.797
51	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6 Layanan	6 Layanan	100,00	145.910.000	142.522.203	97,68	3.387.797
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	18,91%	18775%	99,29	226.457.000	223.711.400	98,79	2.745.600
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	63,8 ha	63,84 ha	100,06	226.457.000	223.711.400	98,79	2.745.600
52	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	1 kali	1 kali	100,00	49.230.000	49.003.000	99,54	227.000

53	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	1 paket	1 paket	100,00	177.227.000	174.708.400	98,58	2.518.600
	Jumlah Anggaran dari seluruh Program				44.932.465.341	13.127.952.486		5.548.607.883

C. KINERJA LAINNYA

PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan berbasis masyarakat pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan.

PENGHARGAAN SKPD







**TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI TAHUN SEBELUMNYA
(LHE INSPEKTORAT)**

Hasil Evaluasi	Rekomendasi Inspektorat Kab. Balangan	Progres Aksi
a. Evaluasi terhadap perencanaan masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu kualitas perencanaan kinerja tahunan kurang memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam hal penyusunan anggaran.	a. Melakukan Perencanaan Kinerja Tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran.	a. DPMPTSPPTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran.
b. Pengukuran kinerja masih terdapat hal yang menjadi perhatian yaitu hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.	b. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.	b. Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
c. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	c. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.	c. Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-kino, mengupload di googledrive kurkin.
d. Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	d. Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	d. Melakukan tindak lanjut Rencana Aksi yang telah dibuat
e. Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai	e. Analisis capaian kinerja (outcome) memadai	e. Melakukan analisis capaian kinerja (outcome)

**PROGRES PERBAIKAN AKIP
YANG TELAH DILAKUKAN**

SEBELUM	SESUDAH
1. Evaluasi internal masih terbatas pada pemenuhan pelaksanaan evaluasi;	Sudah dilaksanakan monev / evaluasi Rencana kinerja minimal 3 bulan sekali.
2. Pemantauan dan evaluasi program dan rencana aksi masih perlu ditingkatkan dan didokumentasikan;	Sudah dilaksanakan monev/evaluasi rencana aksi minimal 3 bulan sekali.
3. Upaya tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dan didokumentasikan;	
4. Upaya tindak lanjut dalam bentuk Langkah-Langkah nyata atas hasil evaluasi rencana aksi masih sangat kurang.	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2022 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar **Rp 403,601,000,000,00** (Empat Ratus Tiga Milyar Enam ratus Satu Juta Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi investasinya sebesar Rp 115,122,788,614,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi kenaikan sebesar 302.257 Juta Rupiah.

Angka pengangguran terbuka, terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2022 sebesar 2,43% dan realisasi yang dicapai **3,98%**. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran terbuka masih dibawah target, namun upaya yang maksimal sudah dilakukan agar menekan Angka pengangguran Terbuka tidak meningkat secara drastis karena banyak factor lain yang sangat berpengaruh salah satunya karena pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk kembali melakukan pemulihan ekonomi.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah **88,50** setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan **A** dan kinerja unit pelayanan **sangat baik**. Secara keseluruhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

4.2 Saran

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada untuk lebih bekerja keras mengumpulkan dan mengolah data yang terdapat dalam LKPM.
2. Melakukan survey langsung ke Perusahaan yang tidak melakukan entry data LKPM dan mendorong perusahaan supaya melaksanakan entry data LKPM terhadap jumlah investasi yang telah dilakukan.
3. Meminta data yang diperlukan untuk dilakukan entry data LKPM di Dinas DPMPTSPPTK (Strategi jemput bola).
4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
5. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.
6. Mempertahankan target-target yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja atas target-target kinerja yang belum tercapai serta agar informasi mengenai data kinerja dapat diandalkan/dipercaya, namun perlu ditambah agar selanjutnya dimasukkan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
7. Menjadikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.